



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/janayu

*Correspondence:
nanikprasetyoningsih@umy.ac.id

DOI: 10.22219/janayu.v4i1.22972

Sitasi:
Prasetyoningsih, N., Wardhana, A, FF, G., Mujiyana., Iswandi, K., Putra, I, L., Wrediningsih, R.(2023). Pengembangan Potensi Desa Wisata Padukuhan Tawangrejo, Purwobinangun, Pakem, Sleman. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 4(1), 16-27.

**Proses Artikel
Diajukan:**
20 Oktober 2022

Direviu:
19 Desember 2022

Direvisi:
11 Februari 2023

Diterima:
28 Februari 2023

Diterbitkan:
28 Februari 2023

Alamat Kantor:
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang Gedung Kuliah Bersama 2 Lantai 3. Jalan Raya Tlogomas 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia

P-ISSN: 2721-0421
E-ISSN: 2721-0340

Pengembangan Potensi Desa Wisata Padukuhan Tawangrejo, Purwobinangun, Pakem, Sleman

Nanik Prasetyoningsih*¹, Allan Fatchan Gani Wardhana², Mujiyana³, Kelik Iswandi⁴, Ilham Setiawan Putra⁵, Sri Rahayu Wrediningsih⁶

^{1, 5, 6}Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁴Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The PKM Community Service Program is implemented in collaboration with the Tawangrejo, Purwobinangun, Pakem governments. The growth of tourism villages in the Sleman Regency is a manifestation of the Sleman Regency Tourism Development Master Plan (RIPK). The condition of the Padukuhan Tawangrejo Tourism Village is still at the "developing" level, where the community has realized its potential and has planned to create a tourism village, but it has not been developed further. This Community Service Program was implemented to help the Tawangrejo Education Tourism Village Pilot Team develop the Tawangrejo educational tourism village concept. This Community Service Program is conducted through a tourism village management workshop followed by field trips to determine points that can be used as tourist destinations throughout the Tawangrejo Region. The field trip resulted in the Tawangrejo Tourism Village Development Plan Document. This document will later be used as a guideline and direction in further developing the Tawangrejo Tourism Village.

KEYWORDS: Education Tourism; Empowerment; Tourism Village.

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat PKM ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Padukuhan Tawangrejo, Purwobinangun, Pakem. Pertumbuhan Desa Wisata di Kabupaten Sleman, merupakan perwujudan dari Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Sleman. Kondisi Desa Wisata Padukuhan Tawangrejo masih pada tingkat "berkembang", dimana masyarakatnya sudah menyadari potensi dan sudah merencanakan akan dibuat desa wisata, akan tetapi belum dikembangkan lebih jauh. Program Pengabdian ini dilaksanakan untuk membantu Tim Perintis Desa Wisata Pendidikan Tawangrejo mengembangkan Konsep Desa Wisata Pendidikan Tawangrejo. Program Pengabdian ini dilaksanakan melalui workshop pengelolaan desa wisata dilanjutkan dengan field trip



untuk menentukan titik-titik yang dapat dijadikan tujuan wisata di seluruh Kawasan Tawangrejo. Field trip yang dilakukan menghasilkan Dokumen Rencana Pengembangan Desa Wisata Tawangrejo. Dokumen ini yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam pengembangan Desa Wisata Tawangrejo selanjutnya.

KATA KUNCI: Desa Wisata; Pemberdayaan; Wisata Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Program desa wisata sebagai pariwisata alternatif diharapkan mampu memberikan tiga kontribusi yang positif bagi pengembangan masyarakat, antara lain: (1) mendorong pelestarian alam seperti: “bentang alam, persawahan, sungai, danau”, (2) mereduksi pemanasan global, dan (3) menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan ([Hermawan, 2016](#)). Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian akan potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di desa ([Damasdino et al., 2020](#)). Desa Wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah asset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut ([Sudibya, 2018](#)).

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah yang dapat di suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata atau segala hal keadaan yang nyata atau dapat diraba, maupun yang tidak dapat diraba, yang digarap diatur dan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan atau diwujudkan (Nugraha, 2020). Misalnya menanam padi, menurut Didin Syarifuddin, ternyata menanam padi mengandung nilai budaya yang memiliki daya tarik wisata ([Syarifuddin, 2020](#)). Didin Syarifuddin menyatakan bahwa prosesi tanam padi sarat dengan nilai budaya serta memiliki daya tarik wisata ([Syarifuddin, 2020](#)). Nilai tersebut tergambar dari nilai hakikat manusia, hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar, hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, hakikat hubungan manusia dengan karya dan beramal, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lain. Sementara daya tarik wisatanya tergambar dari keunikan, kemenarikan, kelangkaan, keaslian, kebersihan dan keamanan ([Syarifuddin, 2020](#)). Dengan demikian pengembangan pariwisata juga harus selalu dilakukan dengan memelihara kebudayaan serta aspek aspek sosialnya ([Hamzah et al., 2021](#)), maka dari itu perlu pengaturan yang berguna untuk merancang strategi pengembangan yang dapat meningkatkan pendapat masyarakat desa dan menghidupkan sektor ekonomi desa.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 maka insiasi pembangunan desa wisata di Padukuhan Tawangrejo dapat dikategorikan pada tingkatan rintisan, yakni masih berupa potensi dan belum adanya kunjungan wisatawan ([Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, 2015](#)). Selain itu sarana dan prasarannya masih sangat terbatas, dengan tingkat kesadaran masyarakat belum tumbuh. Di atas rintisan, masih ada 3 tingkatan desa wisata lagi, yakni berkembang, maju, dan mandiri ([Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, 2015](#)). Tingkat “berkembang”, maksudnya bahwa sebuah desa wisata meski masih berupa potensi, namun sudah mulai dilirik untuk dikembangkan lebih jauh. Sementara tingkat “maju”, masyarakatnya sudah sadar wisata

dengan indikator sudah dapat mengelola usaha pariwisata, termasuk menggunakan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata. Wilayahnya juga sudah dikunjungi banyak wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan tingkat yang paling tinggi adalah tingkat “mandiri”, yakni desa wisata yang sudah ada inovasi pariwisata dari masyarakat, destinasi wisatanya juga sudah diakui dunia dengan sarana dan prasarana yang terstandarisasi. Selain itu pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix.

Tumbuhnya desa-desa wisata di Kabupaten Sleman, merupakan perwujudan dari Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Sleman untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 ([Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, 2015](#)). Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku ([Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, 2015](#)). Kabupaten Sleman memiliki Desa Wisata sebanyak 38 desa wisata yang tersebar di 15 kecamatan yang dari tahun 2015 diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan potensi, SDM, kunjungan wisatawan, fasilitas, modal, pemasaran, infrastruktur dan masyarakatnya. Dari beberapa indikator tersebut desa wisata diklasifikasikan menjadi tumbuh, berkembang dan mandiri ([Lampiran Perda Kab Sleman Nomor 9 Tahun 2016, 2021](#)).

Kabupaten Sleman sejak tahun 2015, mencanangkan pengembangan desa wisata dengan mempertimbangkan kondisi alam yang subur dan menawan. Pengembangan desa wisata akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan tetap mempertahankan lingkungan alamnya. Setiap desa wisata memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain sehingga antar desa wisata bisa saling mendukung dan bersinergi untuk mencapai Desa Wisata Mandiri ([Lampiran Perda Kab Sleman Nomor 9 Tahun 2016, 2021](#)).

Gagasan merintis Desa Wisata di sebagian wilayah padukuhan di Desa Purwobinangun sudah diinisiasi sejak Pemerintah Desa Purwobinangun mendapatkan aliran Dana Desa. Padukuhan Tawangrejo, yang merupakan desa kelima di bawah Puncak Merapi memiliki potensi wisata alam yang bagus. Letak Geografis Padukuhan Tawangrejo yang cukup tinggi, dan hanya berjarak 1 km dari Kali Boyong, serta terdapatnya beberapa UMKM diantara UMKM Batik, UMKM Makanan Khas dari Salak, serta Kawasan Padukuhan yang sebagian besar ditanami tanaman salak, karena hampir semua warganya menanam tanaman salak pondoh di pekarangan rumah. Suasana Padukuhan Tawangrejo yang cukup sejuk, asri, dan bebas polusi membuat Pemerintah Kalurahan melirik Padukuhan Tawangrejo menjadi salah satu destinasi wisata di Desa Purwobinangun.

Program PKM yang dilakukan kali ini maksud memberikan dukungan motivasi dan penyuluhan pengelolaan desa wisata. Pengembangan desa wisata dapat mengikuti konsep 4 A yang dikembangkan oleh Echtner, yaitu: sajian wisata (*attractions*), pelaku atau pengelola wisata (*actors*), pelaksanaan (*actions*) dan daya dukung masyarakat (*atmospheres*) ([Echtner, 2002](#)). Konsep branding dalam wisata menurut Pike, bertujuan objek wisata menjadi daya tarik yang spesial, tidak mudah tergantikan oleh yang lain (Pike, 2005). Daya tarik wisata yang unggul dan berkualitas merupakan faktor kunci yang menentukan motivasi wisatawan untuk berwisata, serta sebagai alasan fundamental yang menjadi pertimbangan pemilihan destinasi ([Brahmanto et al., 2017](#)).

Tiga Komponen yang perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata, antara lain: (1) Kondisi desa Sekarang, Potensi wisata desa harus digali dari basis data yang jelas

mengenai lahan, lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu lokasi wisata nantinya ([Damardino, 2015](#)), kekayaan keanekaragaman hayati yang berada di desa memiliki peluang yang sangat besar dalam meraih atau memperoleh manfaat dari sebuah lokasi wisata (Maulida et al., 2015). (2) Keadaan Masyarakat dan Struktur Organisasi. Desa wisata akan sangat berkembang jika dikelola oleh desa sendiri, kebutuhan akan organisasi yang khusus mengurus desa wisata dibutuhkan agar berkelanjutan serta ada pihak yang menentukan arah desa wisata ([Sudibya, 2018](#)). (3) Konsep Desa Wisata yang unik ([Brahmanto et al., 2017](#)). Konsep atau ide desa wisata menjadi ujung tombak pembeda antara wisata lain di daerah lain. Pembentukan konsep desa wisata ini dapat semakin tajam jika dipadukan dengan pemetaan wilayah yang dilakukan di awal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata merupakan basis dasar pengembangan pariwisata di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009), yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional ([Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, 2011](#)). Dalam kedua peraturan tersebut mendorong peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, meliputi meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata dan mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.

Kebijakan Pengembangan pariwisata di daerah tersebut, ditindaklanjuti dengan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (DAK Fisik Bidang Pariwisata) bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Khusus Fisik Bidang Pariwisata. DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ([Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Khusus Fisik Bidang Pariwisata, 2018](#)). Peraturan Menteri ini langsung melaksanakan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa diperlukannya bantuan pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di tiap kawasan pariwisata. sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata, maka kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Pemerintah Kabupaten Sleman menindaklanjuti peraturan ini dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dengan menetapkan bahwa pengembangan desa wisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan daya Tarik wisata di Kabupaten Sleman ([Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, 2015](#)). Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah, pemerintah propinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Janayu

4.1

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pengembangan desa wisata yang tersebar di 17 kecamatan dengan melalui 3 cara, yaitu: (1) mengembangkan atraksi lokal, unik dan indah baik alam, budaya, kerajinan dan kuliner di setiap desa wisata dan/atau desa budaya agar mampu memiliki ciri khas yang berkarakter dan unggul; (2) mengembangkan sarana

penunjang atraksi di Desa Wisata guna memberikan peningkatan pelayanan bagi wisatawan; dan (3) melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola Desa Wisata agar dapat memberikan pelayanan prima bagi konsumen untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan ([Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan, 2015](#)).

Permasalahan yang dihadapi mitra dalam pengembangan desa wisata, adalah dalam hal ide pengembangan dan biaya desa wisata. Dukuh Tawangrejo bersama 9 orang kader, sudah sejak lama mendiskusikan, melakukan studi banding, dan membuat konsep pengembangan desa wisata Tawangrejo, akan tetapi hingga tahun 2022, semua ide-ide dan konsep tersebut belum terlaksana, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan sumber dana karena belum ada kepastian pendanaan dari Desa Purwobinangun, disamping juga konsep pengembangan yang belum sesuai keinginan masyarakat dan kondisi riil Kawasan Padukuhan, dan selalu berubah dikarenakan banyak faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka Program PKM ini akan memberikan dukungan bagi Dukuh Tawangrejo dan kelompok masyarakat desa wisata untuk membangun konsep dan mengembangkan Desa Wisata Tawangrejo, melalui beberapa kegiatan seperti: Sosialisasi kepada masyarakat Padukuhan Tawangrejo mengenai pengembangan kawasan padukuhan menjadi desa wisata, penyuluhan mengenai peraturan kepariwisataan yang terkait dengan pembentukan desa wisata, *field trip*, dan penetapan rencana tindak lanjut pengembangan Desa Wisata Tawangrejo.

METODE

Pelaksanaan pengabdian Pengembangan Desa Wisata Tawangrejo dilaksanakan dalam kurun waktu empat minggu. Program Pengabdian Masyarakat di Padukuhan Tawangrejo dilakukan dengan 4 kegiatan, sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Metode	Materi	Outcome	Pelaksana/ Penanggungjawab
1	Sosialisasi kepada masyarakat Padukuhan Tawangrejo mengenai pengembangan Kawasan padukuhan menjadi desa wisata	Sarasehan	Rencana Pengembangan Desa Wisata Tawangrejo	Masyarakat mengetahui dan memahami rencana pengembangan Desa Wisata Tawangrejo, serta Memberikan dukungan untuk pengembangan lebih lanjut.	Mujiyana Ilham Setiawan Putra
2	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan kepariwisataan yang terkait dengan pembentukan desa wisata	Penyuluhan	Undang-Undang Kepariwisataaan Peraturan Pemerintah Rencana Induk Kepariwisataaan Peraturan Menteri Rencana Strategis Kepariwisataaan	Masyarakat mengetahui dan memahami tentang peraturan kepariwisataan yang terkait dengan pembentukan desa wisata	Nanik Prasetyoningsih Sri Rahayu Werdiningsih

			Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata		
3	Perancangan <i>site plan</i> lokasi desa wisata	<i>Field-trip</i>	Seluruh Kawasan Padukuhan Tawangrejo yang memiliki potensi wisata	Masyarakat menyusun Dokumen Pengembangan Desa Wisata Tawangrejo	Allan Fatchan Gani Wardhana Kelik Iswandi
4	Penentuan Rencana Tindak Lanjut	<i>Workshop</i>	Dokumen Pengembangan Desa Wisata Tawangrejo	Masyarakat menetapkan rencana aksi pengembangan Desa Wisata Tawangrejo lebih lanjut	Mujiyana Allan Fatchan Gani Wardhana

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu Sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana rintisan Tawangrejo sebagai desa wisata; Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan kepariwisataan yang terkait dengan pembentukan desa wisata; Perancangan *site plan* lokasi desa wisata; dan Penentuan Rencana Tindak Lanjut berdasarkan hasil *workshop*, *field trip*, dan studi banding.

a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana rintisan Tawangrejo sebagai desa wisata

Dalam pengembangan desa wisata diperlukan komitmen dan dukungan masyarakat, sehingga sosialisasi mengenai rencana rintisan padukuhan Tawangrejo menjadi desa wisata harus disampaikan ke masyarakat sejak awal. Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Padukuhan Tawangrejo bertanggungjawab dan berperan dalam menggerakkan dukungan menciptakan iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya desa wisata. Pokdarwis juga bertanggungjawab akan terwujudnya sapta pesona serta melalui wisata meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan warga masyarakat. Kelompok Pokdarwis Tawangrejo melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep sadar wisata; serta menggalang dukungan masyarakat untuk membangun desa wisata Tawangrejo. Kelompok Pokdarwis selanjutnya akan berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar Kawasan wisata untuk menjadi tuan rumah yang baik, memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Janayu

4.1

Pokdarwis Tawangrejo diketuai langsung oleh Dukuh Tawangrejo, yakni Bapak Dwi Hartanto, beranggotakan tokoh masyarakat, beberapa kader pemuda, dan PKK. Fungsi Pokdarwis dalam hal ini ada 2 yaitu: (1) sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan Padukuhan Tawangrejo dan (2) sebagai mitra pemerintah dalam upaya

perwujudan pengembangan desa wisata dan sadar wisata. Kelompok Pokdarwis dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas peran dan kontribusi Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan serta melakukan kualitas pembinaan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata.

Menjadikan Kawasan Padukuhan Tawangrejo menjadi Wisata Desa berarti mengubah Kawasan Padukuhan Tawangrejo menjadi Kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan berbagai potensi unik desa yang telah dikembangkan menjadi komponen wisata, seperti pesona alam desanya, kuliner khas desanya, kerajinan khas masyarakat desa, dan lain sebagainya. Maka sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.



Gambar 1. Sarasehan Sosialisasi Desa Wisata

b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan kepariwisataan yang terkait dengan pembentukan desa wisata

Workshop dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman Tim Perintis Desa Wisata akan pengelolaan dan pendirian desa wisata. Pemateri Workshop adalah seorang praktisi dan sekaligus pendiri Desa Wisata Pulesari, Donokerto, Turi yang Bernama Bapak Didik Irwanto. Menurut Pak Didik Irwanto, beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pendirian desa wisata, antara lain: potensi yang dimiliki (layak jual); komitmen masyarakat; identifikasi dampak positif dan negatif pendirian desa wisata terhadap kehidupan masyarakat setempat; komitmen Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan dukungan pendirian desa wisata; kesiapan perangkat regulasi; penguatan kapasitas pengelola desa wisata; strategi dan media promosi; serta perlu untuk melakukan studi banding ke desa wisata lain yang sudah berhasil. Desa Wisata juga harus memiliki “*product style*” dalam arti daya tarik desa wisata yang memenuhi kriteria “Asli, Lokal, Unik, dan Indah. Dengan demikian Desa Wisata juga harus memiliki perbedaan dengan desa wisata yang lain, yakni dengan ketersediaan fasilitas “*something to see, something to do, dan something to buy*” yang dilengkapi dengan sarana-prasarana yang terpelihara dan terjaga dengan baik.



Gambar 2. Workshop Pengelolaan dan Pendirian Desa Wisata

Workshop diikuti oleh 6 orang anggota Kelompok Pokdarwis Tawangrejo. Pada saat workshop dibagikan pre-test dan post-test untuk mengetahui pemahaman peserta akan pengelolaan dan pendirian desa wisata. Hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Kemampuan Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

No	Pertanyaan	Sebelum Pelatihan		Sesudah Pelatihan	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Apakah Anda sudah pernah mengelola desa wisata?	0	6	6	0
2	Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan pengelolaan dan pendirian desa wisata?	Pernah 1	Belum pernah 5	Pernah 6	Belum pernah 0
3	Apakah Anda mengetahui konsep desa wisata?	Mengetahui 1	Tidak 5	Mengetahui 0	Tidak 6
4	Apakah Anda pernah melakukan studi banding ke desa wisata yang sudah berhasil?	Ya 1	Tidak 5	Ya 6	Tidak 0
5	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan desa wisata berbasis komunitas?	Ya 0	Tidak 6	Ya 6	Tidak 0

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 peserta belum ada satu pun yang memiliki pengalaman dalam mengelola desa wisata. Dari 6 peserta, hanya ada 1 peserta yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan dan pendirian desa wisata serta studi banding ke desa wisata yang sudah berhasil. Terkait dengan pemahaman akan konsep desa wisata berbasis masyarakat, keenam peserta belum mengetahui dan memahaminya.

c. Perancangan *Site Plan* Lokasi Desa Wisata

Perancangan *site-plan* lokasi desa wisata dilakukan dengan metode *fieldtrip*. Dengan didampingi oleh Praktisi Desa Wisata, yaitu Bapak Didik Irwanto, Kelompok Pokdarwis Tawangrejo melakukan *fieldtrip*, guna meninjau Kawasan Padukuhan Tawangrejo yang memiliki potensi wisata yang layak dikemas sebagai paket wisata Tawangrejo. Hasil *fieldtrip* kemudian didiskusikan kemungkinan penataan Kawasan lokasi wisata dan proyeksi pendirian desa wisata., yang selanjutnya didokumentasikan dalam dokumentasi “Rencana Pendirian Desa Wisata Tawangrejo”. Dokumen ini akan menjadi pedoman dan arahan pendirian dan pengembangan selanjutnya Desa Wisata Tawangrejo.

Fieldtrip dilakukan sebagai upaya identifikasi pariwisata di wilayah Padukuhan Tawangrejo. Potensi-potensi yang tersedia di Kawasan Padukuhan digali sedemikian rupa untuk dijadikan objek wisata, sehingga perlu dikenali dengan benar karakter daya tarik wisata dan Kawasan wisatanya, sehingga akan dapat ditentukan jasa wisata apa saja yang dapat diselenggarakan di lokasi wisata tersebut, serta bentuk-bentuk penyelenggaraan kegiatan rekreasi, hiburan, serta penyediaan sarana dan prasarana wisata bagi pengunjung. Dokumentasi kegiatan disajikan pada Gambar 4.



Gambar 3. Fieldtrip Peninjauan Lokasi Wisata

d. Penentuan Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Workshop, Field Trip, Dan Studi Banding

Workshop ini dilakukan untuk menentukan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Desa Wisata di Padukuhan Tawangrejo. RTL disusun berdasarkan pada beberapa hal, antara lain: potensi alam yang ada di Kawasan padukuhan; kesiapan dan dukungan warga masyarakat; dana yang tersedia; sumber daya manusia yang ada; dan dukungan kebijakan dan pembiayaan dari Pemerintah Desa Purwobinangun.

Potensi-potensi tersebut dirumuskan guna menentukan *product syle* pariwisata Padukuhan Tawangrejo. *Product style* harus dirumuskan dengan mempertimbangkan 4 hal; yaitu: (1) daya tarik objek wisata termasuk keasliannya: asli, lokal, unik dan indah ; (2) berbeda dengan objek wisata yang lain; (3) dukungan kondisi sarana dan prasarana yang terpelihara dan terjaga dengan baik; dan (4) ketersediaan fasilitas “*something to see, something to do dan something to buy*”, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang lainnya.



Gambar 4. Workshop Penentuan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Desa Wisata

e. Indikator Keberhasilan Program Pengabdian

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sumber daya tersebut dapat meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang berada di lingkungan sekitar masyarakat tersebut. (Pujiati et al., 2022) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh penulis adalah pemberian dukungan motivasi pembangunan Desa Wisata Padukuhan Tawangrejo; serta memberikan kesadaran wisata bagi masyarakat sesuai dengan konsep Sapta Pesona. Sapta Pesona terdiri atas 7 nilai pesona wisata, yaitu: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Sapta Pesona merupakan jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata melalui perwujudan unsur sapta pesona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata di Padukuhan Tawangrejo, sehingga dapat mendukung akselerasi pengembangan desa wisata yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan agar dapat berperan strategis dalam pengembangan desa wisata. Harapannya pengembangan desa wisata di Padukuhan Tawangrejo dapat dilakukan dengan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat lokal atau disebut dengan *community based tourism-CBT* (Sidiq & Resnawaty, 2017). CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat (Sidiq & Resnawaty, 2017). Seluruh ide kegiatan serta pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, sehingga manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Konsep CBT menempatkan peran masyarakat asli merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata (Sidiq & Resnawaty, 2017). Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. kepariwisataan yang berkembang melalui desa wisata tidak saja akan memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat setempat namun lebih luas lagi akan memperkuat ketahanan sosial budaya bangsa dan negara (Andayani et al., 2017). prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan (Atmoko, 2021). Masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan wisata, menjadi pengampu kepentingan kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya masyarakat yang pada akhirnya akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata desa (Atmoko, 2021).

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian ini, diukur dari empat kriteria, yaitu: (1) tingkat partisipasi peserta selama pelaksanaan program pengabdian; (2) tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan kepada masyarakat; (3) dampak program pengabdian bagi masyarakat; dan (4) kesesuaian materi yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi dilihat dari peserta yang hadir pada setiap kegiatan, serta dilihat juga keaktifan peserta selama mengikuti kegiatan. Tingkat pemahaman peserta dapat dilihat dari keaktifan memberikan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman dan harapan masing-masing peserta terhadap pembangunan desa wisata di Padukuhan Tawangrejo. Dampak penyuluhan dilihat dari peserta menguasai materi penyuluhan dan memahami permasalahan yang mendasar mengenai dasar-dasar pengetahuan dan strategi membangun desa wisata. Sementara terkait dengan kesesuaian materi, bahwa materi penyuluhan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengingat masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk membangun desa wisata.

SIMPULAN

Manfaat pelaksanaan PKM bagi masyarakat Padukuhan Tawangrejo, salah satunya adalah masyarakat Padukuhan Tawangrejo mengetahui dan memahami adanya rencana pengembangan Desa Wisata Tawangrejo. Pemahaman masyarakat ini sangat penting maknanya bagi pengembangan desa wisata selanjutnya yang sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan dan *field trip*, kelompok masyarakat dapat menyusun Dokumen Pengembangan Desa Wisata Tawangrejo berdasarkan hasil *field trip*, dan disesuaikan dengan serangkaian peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan yang masih berlaku, terutama dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman.

Pembangunan Desa Wisata Tawangrejo membutuhkan sumberdaya dan pembiayaan yang cukup besar. Dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya sangat diperlukan. Pemerintah Desa sebaiknya memberikan dukungan dalam hal kebijakan dan keuangan guna membangun Desa Wisata Tawangrejo, dan sebaiknya juga Tim Perintis menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung pendirian desa wisata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Atmoko, T. P. H. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Media Wisata*, 12(2), 146–154. <https://doi.org/10.36276/mws.v12i2.209>
- Brahmanto, E., Hermawan, H., & Hamzah, F. (2017). Strategi Pengembangan Kampung Batu Malakasari Sebagai Daya Tarik Minat Khusus. *Jurnal Media Wisata*, 15(2), 588–600. <https://doi.org/10.36276/mws.v15i2.112>
- Damardino, F. (2015). Studi Karakteristik Wisatawan dan Upaya Pengembangan Produk Wisata Tematik di Pantai Goa Cemara, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo Baru Kabupaten Bantul. *Jurnal Media Wisata*, 13(2), 308–320. <https://doi.org/10.36276/mws.v13i2.130>
- Damardino, F., Parsidi, Saputra, A. D., Sinangjoyo, N. J., Ariani, A., Anwari, H., & Islami, M. E. N. (2020). Pelatihan Mengelola Homestay di Desa Wisata Donokerto. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 1(1), 26–32. <https://doi.org/10.36276/jap.v1i1.13>
- Echtner, C. M. (2002). The Content of The Third World Tourism Marketing: 4A Approach. *International Journal of Tourism Research*, 4(1), 413–434. <https://doi.org/10.1002/jtr.401>
- Hamzah, F., Hermawan, H., & Srinatami, D. (2021). Analisis Strategi Pengembangan Situs Cagar Budaya Gunung Padang Sebagai Destinasi Wisata Budaya. *Jurnal Media Wisata*, 19(1), 57–67. <https://doi.org/10.36276/mws.v19i1.288>
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, III(2), 105–117. <https://doi.org/10.31294/par.v3i2.1383>
- Lampiran Perda Kab Sleman Nomor 9 Tahun 2016, (2021).

- Maulida, T. N., Rengga, A., & Subowo, A. (2015). Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Widuri Water Park Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(4), 1–10. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i4.9118>
- Nugraha, Y. E. (2020). Analisis Potensi dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Tulakadi Kawasan Perbatasan Indonesia. *Jurnal Media Wisata*, 18(2), 195–209. <https://doi.org/10.36275/mws>
- Pike, S. (2005). Tourism Destination Branding Complexity. *The Journal of Product and Brand Management*, 14(4), 258 –259. <https://doi.org/10.1108/10610420510609267>
- Pujiati, P., Dewi, N. K., & Setiawan, D. (2022). Training and Assistance in Production of Industrial-Scale Bioslurry Compost Fertilizer to Overcome Fertilizer Scarcity in Puntukdoro Village, Plaosan, Magetan. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.29062/engagement.v6i1.954>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, (2009).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan, (2015).
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, (2015).
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Khusus Fisik Bidang Pariwisata, (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional, (2011).
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208>
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bappeda Litbang*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>
- Syarifuddin, D. (2020). Nilai Budaya Tanam Padi Sebagai Daya Tarik Wisata. *Jurnal Media Wisata*, 18(2). <https://doi.org/10.36275/mws>